



Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Arrum Ramandani^{1*}, Evada Dewata², Desi Indriasari³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

* E-mail Korespondensi: evada78@polsri.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-03-2026

Revision: 26-03-2026

Published: 30-03-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1461

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan informasi dan bagaimana teknologi memengaruhi pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyuasin 1 dan Kabupaten Rambutan. Pendekatan pengambilan sampel jenuh digunakan untuk mengambil sampel 30 komunitas untuk analisis kuantitatif ini. Lima responden dari setiap desa diberikan kuesioner sebagai bagian dari proses pengumpulan data, menghasilkan 136 responden. SPSS 25 digunakan untuk analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas, keadilan, dan teknologi meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa, tetapi transparansi, tanggung jawab, dan independensi tidak. Teknologi informasi dan *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan) memengaruhi administrasi keuangan dana desa.

Kata Kunci: Tata kelola, Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian, Keadilan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

ABSTRACT

This study examines the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness of information and how technology influences the management of village funds in Banyuasin 1 Regency and Rambutan Regency. A saturated sampling approach was used to sample 30 communities for this quantitative analysis. Five respondents from each village were administered a questionnaire as part of the data collection process, resulting in 136 respondents. SPSS 25 was used for multiple linear regression analysis. This study found that accountability, fairness, and technology improve the financial management of village funds, but transparency, responsibility, and independence do not. Information technology and good governance (transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness) influence the financial administration of village funds..

Acknowledgment

Keyword: *Good governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, Information Technology Utilisation, Village Fund Financial Management*

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Sejak 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Dana Desa yang mendelegasikan otoritas pada pemerintah tingkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan serta aset desa guna menunjang kesejahteraan warga. Setiap tahunnya, pemerintah pusat mengalokasikan dana triliunan rupiah yang ditransfer ke desa melalui APBD kabupaten/kota. Data Kementerian Keuangan menunjukkan tren peningkatan alokasi Dana Desa secara konsisten, dimulai dari Rp20,7 triliun pada tahun 2015 hingga menyentuh angka Rp71 triliun pada tahun 2024. Hingga tahun tersebut, total penyaluran Dana Desa telah melebihi Rp600 triliun yang tersebar ke lebih dari 83.000 desa di seluruh Indonesia (kemenkeu.go.id). Dana Desa yang dialokasikan melalui APBN diutamakan untuk pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, seperti infrastruktur desa yang rusak atau belum dibangun, khususnya jalan desa. Sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 20/2018, pengelolaan dana desa dilakukan melalui serangkaian tahapan dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan berlandaskan asas-asas pengelolaan yang baik, meliputi tertib anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Good Governance ialah isu utama pengelolaan keuangan publik saat ini (Jauhari et al., 2019). *Good Governance* dapat dilihat sebagai sarana untuk menangani berbagai urusan publik (Mardiasmo, 2018). Dari *World Bank*, *Good Governance* merepresentasikan pelaksanaan manajemen pembangunan kokoh serta dilandasi prinsip tanggung jawab, selaras dalam nilai-nilai demokratis, dan mekanisme distribusi ekonomi yang berjalan optimal, serta berorientasi pada pencegahan penyimpangan alokasi sumber daya, pemberantasan korupsi dalam aspek politik maupun administratif, dan penguatan disiplin fiskal secara menyeluruh.

Kabupaten Banyuasin tercatat sebagai kabupaten penerima alokasi Dana Desa paling tinggi ketiga di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini dibagi secara administratif menjadi

288 desa dan 21 kecamatan, termasuk di antaranya Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Banyuasin I yang menjadi lokasi dalam penelitian ini. Berdasarkan data pengalokasian dana desa tahun 2023 dan 2024, terlihat bahwa desa-desa di Kecamatan Rambutan mengalami fluktuasi dalam penerimaan Dana Desa. Beberapa desa mengalami penurunan, seperti Desa Siju, Tanjung Kerang, Rambutan, Sako, Sungai Kedukan, dan Pulau Parang. Sebaliknya, sejumlah desa menunjukkan peningkatan pengalokasian dana desa, dengan lonjakan yang cukup tinggi terjadi di Desa Kebon Sahang dan Desa Sungai Pinang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja dalam pengelolaan dana desa, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan derajat implementasi asas-asas *good governance* serta intensitas pemanfaatan instrumen digital dalam siklus keuangan desa.

Pengalokasian Dana Desa diberikan kepada unit entitas desa yang termasuk dalam lingkup wilayah Kecamatan Banyuasin I menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun, terdapat beberapa desa yang justru mengalami penurunan jumlah alokasi dana yang diterima. Desa Merah Mata mengalami penurunan alokasi dana dari sebesar 1,3 miliar di tahun 2023 menjadi 1,1 miliar pada tahun 2024. Penurunan juga terjadi di Desa Pematang Palas, yaitu dari 1,1 miliar menjadi 900 juta, serta di Desa Perambahan Baru yang menurun dari 900 juta menjadi 600 juta. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan distribusi Dana Desa yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kebutuhan pembangunan, kapasitas perencanaan desa, maupun indikator kinerja yang dijadikan dasar dalam penentuan alokasi dana. Pada tahun 2025, menurut Kepala Bidang Pemerintah Desa Kabupaten Banyuasin, penyaluran Dana Desa menunjukkan progres bertahap, di mana pada tahap pertama telah dicairkan kepada 95 desa, diikuti oleh 63 desa pada tahap kedua, dan 29 desa pada tahap ketiga. Desa yang menerima pencairan awal berasal dari Kecamatan Banyuasin III, Rantau Bayur, Selat Penuguan, Rambutan, dan Air Kumbang. Keterlambatan pencairan di desa lain umumnya disebabkan lambatnya pemenuhan dokumen, mencerminkan kendala administratif yang menghambat pencairan dan pelaksanaan program (Radar Banyuasin, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola keuangan lokal dan sistem informasi, selain itu, pentingnya penguatan prinsip *good governance* serta penggunaan teknologi informasi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Selain kendala administratif, pengelolaan Dana Desa di Banyuasin juga diwarnai penyalahgunaan wewenang. Kapolres Banyuasin mengungkap insiden korupsi Dana Desa yang

menyeret nama mantan Kepala Desa Pulau Borang dalam kurun anggaran tahun 2018-2019. Kegiatan fisik dan rutin yang dianggarkan melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Gubernur sebagian tidak dilaksanakan atau bersifat fiktif meski dilaporkan telah terealisasi. Audit menemukan pelanggaran RAB dalam APBDes, termasuk adanya kegiatan fiktif (Silitonga, 2022).

Adanya kasus penyelewengan tersebut menjadi bukti nyata bahwa lemahnya penerapan konsep *Good Governance* pada pengelolaan keuangan desa terus menjadi masalah besar di banyak daerah. Dengan demikian, upaya reformasi yang terstruktur dan berbasis regulasi diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan tiap pengelolaan keuangan dana desa. Tidakan dalam meningkatkan implementasi *Good Governance* serta penerapan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berpotensi mendukung pemerintah desa meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan dan mengelola data yang berkaitan dengan dana desa secara tepat waktu dan akurat (Nursin et al., 2022).

Maraknya irregularitas menyangkut pengelolaan keuangan desa menandakan perlunya aktualisasi prinsip-prinsip *Good Governance* secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Langkah ini sangat esensial untuk mendorong implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas serta meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran desa (Mudhofar, 2022). Di antara pokok-pokok inti dari *Good Governance* adalah independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, dan *fairness* dan seharusnya bertindak sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien, dengan tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Heriningsih & Sudaryani, 2019).

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa mencerminkan komitmen dalam memastikan keterbukaan informasi yang dapat dijangkau oleh publik, sehingga memungkinkan publik aktif pada pengawasan dan pengambilan keputusan untuk pengelolaan dana desa (Safrizal et al., 2022). Hasil penelitian dari Fitrianti dan Sari (2024) serta Izzah et al., (2021) mengklaim transparansi berkontribusi terhadap pengelolaan dana desa. Sementara itu, menurut studi dari Elisa dan Ginting (2024) serta Yanti et al., (2023) menurutnya transparansi tidak berkontribusi dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas ialah cerminan dari tugas pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan administrasi, pengendalian, serta eksekusi kebijakan yang berorientasi dalam pencapaian

tujuan (Safrizal et al., 2022). Implementasi akuntabilitas yang baik diharapkan dapat mendorong pengembangan manajemen dana desa secara terbuka dan terintegrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur desa. Kajian oleh Fitrianti dan Sari (2024) serta Izzah et al., (2021) merepresentasikan sejauh mana akuntabilitas berkontribusi dalam pengelolaan keuangan ditingkat desa. Sementara itu, temuan dari studi Rohman et al., (2023) dan Susliyanti (2020) mengindikasikan bahwa variabel akuntabilitas tidak berkontribusi dalam menentukan efektivitas pengelolaan dana desa.

Responsibilitas atau tanggung jawab menegaskan pentingnya kesesuaian antara pengelolaan keuangan dan regulasi yang berlaku, serta komitmen terhadap tata kelola yang sehat dan akuntabel. Dalam hal pemerintahan desa, penerapan prinsip responsibilitas menjadi kunci penting dalam tahapan pengelolaan dana desa diwujudkan secara akuntabel maupun terbuka. Studi sebelumnya dilakukan oleh Hayyuny et al., (2024) dan Susliyanti (2020) mengklaim bahwa responsibilitas memiliki dampak pada pengelolaan dana di tingkat desa. Sementara itu, temuan studi Salma dan Diana (2022) mengklaim responsibilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Independensi menekankan pentingnya kemampuan pengelola keuangan desa untuk menjaga integritas pengambilan keputusan dari intervensi yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. Independensi sangat diperlukan agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan bisa dilakukan dengan jujur, adil maupun tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pemerintah desa berwenang untuk melakukan pengelolaan dana desa secara keseluruhan tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Indriasari et al., 2020). Tingkat independensi yang tinggi akan mencerminkan integritas aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Langkah tersebut turut memperkuat persepsi positif publik terhadap tata kelola keuangan desa. Penelitian dari Hayyuny et al., (2024) mengklaim bahwa pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh independensi. Sebaliknya, Salma dan Diana (2022) serta Susliyanti (2020) menyebutkan bahwa independensi tidak mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Fairness mengacu pada pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan pengelolaan dana desa, baik aparat desa ataupun masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama, setara, dan tidak diskriminatif kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, dalam hal akses terhadap informasi, kesempatan untuk berpartisipasi-

pasi, maupun dalam distribusi dan pengelolaan keuangan dana desa. Temuan Studi dari Hayyuny et al., (2024) mengemukakan *fairness* berdampak signifikan pada pengelolaan keuangan desa, namun studi Salma dan Diana (2022) serta Susliyanti (2020) mengindikasikan bahwa keadilan tidak berkontribusi dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Salah satu elemen kunci yang dapat berpengaruh pada seberapa baik manajemen keuangan desa dilaksanakan adalah penggunaan teknologi informasi. Input, pemrosesan data, penyimpanan data, dan keluaran otomatis dalam bentuk informasi untuk masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi informasi (Melinda et al., 2022). Teknologi informasi mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dikemukakan oleh Izzah et al., (2021) dan Nursin (2022). Namun, Melinda et al., (2022) dan Ridwan et al., (2023) menemukan bahwa teknologi informasi belum mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

Adanya perbedaan hasil temuan dalam penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam elemen-elemen yang mempengaruhi bagaimana administrasi dana desa. Di Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, penelitian ini untuk mengkaji pengaruh *Good Governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

METODE PENELITIAN

Studi kuantitatif dan eksploratif ini meneliti bagaimana prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, independensi, dan keadilan) dan teknologi informasi memengaruhi pengelolaan keuangan Dana Desa. Administrasi desa di Kecamatan Rambutan dan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, diteliti.

Kelurahan di kedua kelurahan yaitu 19 di Rambutan dan 11 di Banyuasin I diteliti. Untuk memasukkan semua sampel dalam penelitian, digunakan pengambilan sampel jenuh. Setiap kelurahan memiliki lima responden: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Perencanaan, dan Ketua Badan Konsultatif Desa. Dari 150 kuesioner, 136 dianggap layak untuk dianalisis.

Kuesioner skala Likert 1–5 diperiksa validitas dan reliabilitasnya. Laporan keuangan desa, peraturan pengelolaan Dana Desa, dan dokumen resmi desa menyediakan data sekunder.

SPSS 25 digunakan untuk analisis data regresi linier berganda. Sebelum mengevaluasi hipotesis, dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Untuk mengevaluasi dampak faktor independen terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, uji F, dan R^2 .

HASIL

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas untuk menentukan sejauh mana variabel yang akan diteliti dapat diungkapkan oleh instrumen kuesioner. Aplikasi koefisien r yang diestimasi lebih besar dari nilai r_{tabel} atau nilai signifikansinya $> 0,05$, kuesioner dianggap asli (Ghozali, 2018). Kuesioner menjadi indikator variabel, diukur dengan uji reliabilitas, yang dianggap bisa diandalkan jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,070$ (Ghozali, 2018).

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	N of Items	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi	9	0,317 - 0,720	0,718	Valid dan Reliabel
Akuntabilitas	12	0,540 - 0,690	0,789	Valid dan Reliabel
Responsibilitas	9	0,361 - 0,678	0,742	Valid dan Reliabel
Independensi	9	0,355 - 0,702	0,722	Valid dan Reliabel
Fairness	5	0,524 - 0,797	0,746	Valid dan Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	6	0,565 - 0,829	0,788	Valid dan Reliabel
Pengelolaan Keuangan Dana Desa	15	0,391 - 0,780	0,884	Valid dan Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2025

Menurut temuan uji validitas, nilai r yang dihitung untuk setiap item pertanyaan adalah seluruh variabel $> r_{tabel}$ sejumlah 0,168 (pada taraf signifikansi 0,05 dan jumlah sampel (n) = 136, derajat kebebasan (df) = $n - 2 = 134$). Seluruh item kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel bernilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, instrumen dinyatakan reliabel.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil analisis deskriptif statistik

No	Variabel	N	Min	Max	Mean
1.	Transparansi	136	1	5	4,54
2.	Akuntabilitas	136	3	5	4,65
3.	Responsibilitas	136	2	5	4,61
4.	Independensi	136	2	5	4,46

3490

No	Variabel	N	Min	Max	Mean
5.	Fairness	136	3	5	4,48
6.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	136	3	5	4,43

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2025

Temuan berdasarkan analisis data mengindikasikan bahwa variabel transparansi yang dianalisis memiliki rentang skor antara 1 hingga 5. Skor terendah memperlihatkan masih ada responden yang menilai transparansi pada tingkat sangat rendah, sedangkan skor tertinggi mencerminkan adanya menunjukkan adanya responden yang memberikan penilaian sangat tinggi. Rata-rata nilai mencapai 4,54, transparansi secara umum berada pada kategori tinggi.

Skor pada variabel akuntabilitas berkisar antara 3 hingga 5. Skor terendah memperlihatkan masih ada responden yang menilai akuntabilitas pada tingkat rendah, sedangkan skor tertinggi mencerminkan adanya penilaian berskala tinggi. Memperoleh rata-rata mencapai 4,65, akuntabilitas. secara umum berada pada kategori tinggi.

Variabel responsibilitas memiliki rentang skor antara 2 hingga 5. Skor terendah memperlihatkan masih ada responden yang menilai responsibilitas pada tingkat rendah, sedangkan skor tertinggi mencerminkan adanya penilaian berskala tinggi. Nilai rata-rata sebesar 4,54, responsibilitas secara umum berada pada kategori tinggi.

Variabel independensi memiliki rentang skor antara 2 hingga 5. Skor terendah memperlihatkan masih ada responden yang menilai independensi pada tingkat rendah, sedangkan skor tertinggi mencerminkan adanya penilaian berskala tinggi. Memperoleh rata-rata mencapai 4,54, independensi secara umum berada pada kategori tinggi.

Variabel *fairness* memiliki skor berkisar antara 3 hingga 5. Skor terendah memperlihatkan masih ada responden yang menilai responsibilitas pada tingkat rendah, sedangkan skor tertinggi mencerminkan adanya penilaian berskala tinggi. dengan rata-rata mencapai 4,48, *fairness* secara umum berada pada kategori tinggi.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki rentang skor antara 2 hingga 5. Skor terendah memperlihatkan masih ada responden yang menilai pemanfaatan teknologi informasi pada tingkat rendah, sedangkan skor tertinggi mencerminkan adanya penilaian berskala tinggi. Memperoleh rata-rata mencapai 4,48, pemanfaatan teknologi informasi secara umum berada pada kategori tinggi.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

Menilai apakah data residual dalam model regresi terdistribusi normal adalah tujuan dari uji normalitas data. Dengan taraf signifikansi 0,05, Uji *Kolmogorov-Smirnov* diterapkan untuk menguji uji normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

Kolmogorov-Smirnov	Statistik	N	Asymp.Sig.	Keterangan
Understandardized Residual	0,049	136	0,200 ^d	Data berdistribusi normal

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2025

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan berada pada angka 0,200 melampaui 0,05, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa distribusi residual mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan dalam mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas yang dapat mengganggu kestabilan dan keakuratan hasil regresi (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Hasil Uji Multikoloniaritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Transparansi	0,524	1,908	Tidak terjadi multikolinearitas
Akuntabilitas	0,417	2,400	Tidak terjadi multikolinearitas
Responsibilitas	0,517	1,932	Tidak terjadi multikolinearitas
Independensi	0,550	1,818	Tidak terjadi multikolinearitas
<i>Fairness</i>	0,509	1,694	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,466	2,147	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam tabel 4, seluruh variabel bernilai tolerance > 0,10 serta nilai VIF di bawah 10. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dengan demikian, keseluruhan variabel independen dapat dianalisis secara bersamaan tanpa menimbulkan gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi bersifat tidak konstan (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Hasil Uji *Glejser*

Variabel	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,870	

Variabel	Sig.	Keterangan
Tansparansi (X1)	0,650	Tidak terjadi heterokedastisitas
Akuntabilitas (X2)	0,722	Tidak terjadi heterokedastisitas
Responsibilitas (X3)	0,060	Tidak terjadi heterokedastisitas
Independensi (X4)	0,468	Tidak terjadi heterokedastisitas
Fairness (X5)	0,211	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel independen bernilai signifikansi $> 0,05$, menurut hasil tes *Glejser*, mengindikasikan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas, sehingga model regresi ini sesuai untuk penelitian tambahan.

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	-3,024	-0,522	0,602
Transparansi	-0,012	-0,086	0,932
Akuntabilitas	0,414	2,920	0,004
Responsibilitas	0,150	0,999	0,320
Independensi	0,170	1,138	0,257
Fairness	0,699	3,258	0,001
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,728	3,938	0,000
R Square	0,592		
Adjusted R Square	0,573		

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2025

Temuan pada Tabel 6, menghasilkan model berikut dari persamaan regresi linier berganda:

$$Y = -3,024 - 0,012X_1 + 0,414X_2 + 0,150X_3 + 0,170X_4 + 0,699X_5 + 0,728X_6 + e$$

Maka nilai variabel dependen berada pada titik -3,024, yaitu transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), responsibilitas (X_3), independensi (X_4), *fairness* (X_5), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_6), berada pada nilai nol, maka pengelolaan keuangan Dana Desa diprediksi bernilai negatif sebesar -3,024.

Variabel transparansi mempunyai koefisien regresi sebesar -0,012, yang mengindikasikan arah hubungan negatif pada pengelolaan keuangan Dana Desa. Artinya, peningkatan transparansi sebesar 1% justru diperkirakan menurunkan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 12%. Sebaliknya, peroleha koefisien sebesar 0,414 pada variabel akuntabilitas,

menandakan bahwa setiap kenaikan 1% dalam akuntabilitas dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan sebesar 41,4%.

Variabel *responsibilitas* memiliki koefisien regresi sejumlah 0,150, yang mengindikasikan tiap peningkatan 1% pada aspek ini berpotensi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Dana Desa sebesar 0,150. Sementara itu, variabel *independensi* memiliki koefisien sebesar 0,170, menandakan bahwa peningkatan independensi 1% berkontribusi pada peningkatan pengelolaan keuangan sebesar 17%.

Variabel *fairness* sebesar 0,699 mengindikasikan bahwa peningkatan *fairness* 1% akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 69,9%. Variabel *pemanfaatan teknologi informasi* teridentifikasi berkontribusi dominan yaitu 0,728 menandakan bahwa peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1% dapat mendorong kualitas pengelolaan keuangan Dana Desa sebesar 72,8%.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tingkat kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen ditentukan memakai uji koefisien determinasi (Ghozali, 2018). Variabel *transparansi*, *akuntabilitas*, *tanggung jawab*, *independensi*, *keadilan*, dan *penggunaan teknologi informasi* secara bersama-sama memberikan kontribusi 57,3% terhadap pengelolaan keuangan dana desa, menurut nilai Adjusted R Square 0,573 di Tabel 12, atau 57,3%, Sementara itu, 42,7% merepresentasikan pengaruh elemen-elemen eksternal yang berada di luar cakupan variabel penelitian ini

Uji Parsial (Uji-t)

Derajat kebebasan (df) 129, memperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,979. Uji t dilakukan guna menilai kontribusi individual tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut dianggap berkontribusi jika nilai signifikansi dibawah 0,05 atau t_{hitung} lebih besar dibandingkan t_{tabel} .

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	-3,024	-0,522	0,602	
Transparansi	-0,012	-0,086	0,932	H ₁ Ditolak
Akuntabilitas	0,414	2,920	0,004	H ₂ Diterima
Responsibilitas	0,150	0,999	0,320	H ₃ Ditolak
Independensi	0,170	1,138	0,257	H ₄ Ditolak
Fairness	0,699	3,258	0,001	H ₅ Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,728	3,938	0,000	H ₆ Diterima

3494

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2025

Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk memverifikasi kontribusi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Adanya pengaruh simultan ditunjukkan oleh nilai F_{hitung} yang lebih tinggi dari F_{tabel} serta signifikansi untuk statistik F kurang dari ambang batas 0,05 (Ghozali, 2018).

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2022,930	6	337,155	31,236	,000 ^b
Residual	1392,416	129	10,794		
Total	3415,346	135			

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2025

Temuan pada Tabel 8 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 31,236 pada tingkat signifikansi 0,000. Ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31,236 > 2,17$). Artinya, keenam variabel tersebut secara bersamaan memberikan kontribusi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y).

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Nilai t_{hitung} memperoleh nilai -0,086 dan t_{tabel} adalah 1,979, yang didasarkan dalam temuan pengujian hipotesis pertama. Dapat disimpulkan bahwa H_0 disetujui dan H_1 ditolak karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Ini memperlihatkan pengelolaan keuangan dana desa tidak terpengaruh oleh transparansi parsial. Transparansi yang dilakukan masih bersifat administratif atau formalitas, seperti pengumuman di papan informasi yang belum merata di semua desa serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi seperti website desa, media sosial atau aplikasi digital belum digunakan secara optimal sebagai media keterbukaan. Selain itu, literasi masyarakat yang rendah turut memengaruhi efektivitas transparansi sebagai alat pengawasan. Temuan ini tidak sejalan dengan *agency theory*, yang menekankan pentingnya transparansi dalam mengurangi asimetri informasi antara otoritas desa sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemberi mandat. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dengan memastikan aksesibilitas melalui media yang relevan dan bahasa yang mudah dipahami agar transparansi benar-benar berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan pembangun kepercayaan publik. Penelitian ini didukung oleh penelitian Elisa dan Ginting (2024) serta Yanti et al., (2023) yang menyatakan Pengelolaan keuangan desa

tidak terpengaruh oleh keterbukaan.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Temuan dari pengelolaan data menghasilkan t_{hitung} 2,920 yang melampaui ambang batas t_{tabel} 1,979, sehingga akuntabilitas memenuhi kriteria penerimaan secara statistik. Atas dasar hasil tersebut, H_2 dinyatakan diterima dan H_0 ditolak, dapat dikatakan akuntabilitas terbukti berkontribusi mampu mempengaruhi pengelolaan dana ditingkat desa. Temuan ini menyoroti betapa pentingnya akuntabilitas dalam memajukan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif. Pada perspektif teori keagenan, perangkat desa bertindak sebagai agen yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat sebagai prinsipal. Tingkat akuntabilitas yang tinggi mampu menurunkan potensi asimetri informasi serta memperkuat legitimasi sosial pemerintah desa di mata masyarakat. Secara implementatif, akuntabilitas tercermin dari komitmen perangkat desa untuk bersikap jujur, taat aturan, serta bertanggung jawab dalam alokasi dana publik. Program desa yang dilaksanakan untuk mendorong pembangunan serta peningkatan kualitas hidup penduduk, dengan seluruh proses pengelolaan mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan regulasi turunannya. Temuan studi ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Fitrianti dan Sari (2024) serta Izzah et al., (2021) yang menyatakan Akuntabilitas berdampak pada Pengelolaan Keuangan ditingkat Desa.

Pengaruh Responsibilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Temuan hipotesis, memperlihatkan nilai t_{hitung} adalah 0,999 maupun nilai t_{tabel} ialah 1,979, H_3 dinyatakan ditolak dan H_0 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa responsibilitas tidak berkontribusi terhadap pengelolaan dana ditingkat desa. Tindakan pejabat desa yang mengacu pada regulasi tidak memiliki kontribusi terhadap keberhasilan dalam pengelolaan dana ditingkat desa. Temuan ini bertolak belakang dengan teori keagenan, di mana responsibilitas seharusnya berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban agen (pemerintah desa) atas pelaksanaan tugas dan penggunaan dana yang diamanatkan oleh prinsipal (masyarakat). Agen (Pemerintah Desa) dituntut untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal dan patuh pada aturan serta mekanisme pengawasan yang ada. Ketika prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka pengelolaan keuangan akan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Beberapa aspek pelaksanaan tanggung jawab seperti keterbukaan dalam pelaporan serta kesiapan menerima sanksi atas pelanggaran masih belum dijalankan secara maksimal, sehingga tanggung jawab yang ada cenderung bersifat formalitas. Oleh karenanya, perlu untuk mengambil tindakan

strategis untuk memperkuat implementasi nilai-nilai responsibilitas seperti peningkatan pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa, pemberian pelatihan secara berkala, serta penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi agar tanggung jawab tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan benar-benar tercermin dalam praktik pengelolaan keuangan yang berkualitas. Penelitian Salma dan Diana (2022), responsibilitas tidak berdampak dalam pengelolaan keuangan dana ditingkat desa, yang mendukung studi ini.

Pengaruh Independensi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Temuan hipotesis mengungkapkan t_{hitung} adalah 1,138 yang tidak melampaui ambang batas t_{tabel} 1,979, memperlihatkan H_4 ditolak dan H_0 diterima. Ini menyiratkan bahwa administrasi keuangan dana desa, sampai batas tertentu, tidak terpengaruh oleh independensi. Ini berarti bahwa meskipun salah satu prinsip utama dari *good governance* adalah independensi, persepsi aparatur desa mengenai kebebasan dalam mengambil keputusan atau menjalankan tugas tanpa intervensi tidak secara langsung memengaruhi efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, independensi yang dimiliki perangkat desa hanya sebatas jabatan atau posisi, belum tentu mencerminkan kemampuan nyata dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, serta efektif. Temuan ini bertolak belakang dengan teori keagenan, independensi merupakan unsur penting yang memastikan bahwa agen (perangkat desa) dapat bertindak secara objektif, tanpa konflik kepentingan, dan mampu menjalankan peran sesuai amanah dari prinsipal (masyarakat). Oleh karena itu, perlu ada dukungan nyata seperti pelatihan, pemahaman yang lebih baik tentang aturan, dan sistem pelaporan yang lebih kuat, supaya kebebasan perangkat desa dalam bekerja tidak hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar bisa digunakan untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Temuan dari studi ini selaras dengan sejumlah temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa independensi tidak memberikan kontribusi berarti pada pengelolaan keuangan desa (Salma & Diana, 2022; Susliyanti, 2020).

Pengaruh *Fairness* terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Uji hipotesis memperlihatkan t_{hitung} 3,258 melampaui ambang batas t_{tabel} sebesar 1,979, dapat dikatakan bahwa *fairness* memiliki dampak besar pada bagaimana keuangan dana desa dikelola sebagaimana diindikasikan oleh nilai t_{hitung} yang melampaui parameter kritis t_{tabel} . Sehingga, H_5 diterima sedangkan H_0 ditolak. Ini menunjukkan bagaimana penerapan prinsip *fairness* sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, Menghindari kemungkinan

terjadinya perselisihan kepentingan, Serta menjamin penyaluran dana desa dilakukan secara merata tanpa adanya kecenderungan keberpihakan terhadap pihak tertentu. Penerapan prinsip keadilan yang tinggi dalam tata kelola pemerintahan desa berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan.

Pada teori keagenan, *fairness* berperan penting menciptakan hubungan yang seimbang antara agen (perangkat desa) dan prinsipal (masyarakat). Ketika pemerintah desa bersikap adil dan tidak diskriminatif, potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat pun meningkat. Keadilan yang dirasakan masyarakat juga menjadi bentuk umpan balik atas kinerja pemerintah desa, yang mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, prinsip *fairness* harus diterapkan secara menyeluruh, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Tidak hanya dalam bentuk administratif, tetapi juga melalui tindakan nyata, terutama dalam distribusi program dan manfaatnya. *Fairness* memiliki dampak yang berimplikasi langsung pada optimalisasi pengelolaan keuangan dana desa, menurut penelitian Hayyuni et al., (2024) yang konsisten dengan temuan penelitian ini.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Temuan dari pengujian hipotesis, memperlihatkan penggunaan teknologi informasi berdampak besar secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa, dapat dikatakan H_6 diterima dan H_0 ditolak. Nilai t yang dihitung adalah 3,938, sementara nilai t_{tabel} adalah 1,979. Teknologi informasi memungkinkan untuk mencatat dan melaporkan informasi lebih cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik, keuangan dalam, sehingga meminimalkan risiko kesalahan maupun manipulasi data. Selain itu, teknologi juga mempermudah akses bagi masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan mutu tata kelola kelembagaan desa secara menyeluruh. Temuan ini konsisten dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwa teknologi informasi berperan sebagai alat bantu pengawasan dan pengendalian antara prinsipal (masyarakat dan pemerintah) dan agen (pemerintah desa). Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola keuangan desa meminimalisasi asimetri informasi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas aparatur desa. Dengan demikian, kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa dapat ditingkatkan, serta potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan teknologi, sekaligus memastikan tersedianya infrastruktur pendukung seperti komputer dan jaringan

3498

internet. Langkah ini penting supaya dana desa dikelola secara optimal dengan mengedepankan efisiensi penggunaan, akuntabilitas pelaporan, serta keterbukaan informasi publik. Temuan ini dari Izzah et al., (2021) dan Nursin et al., (2022) mengklaim pemanfaatan teknologi informasi menghadirkan perubahan substansial terhadap pengelolaan anggaran di lingkup pemerintahan desa.

Pengaruh *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Semua variabel independen transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *fairness*, serta pemanfaatan teknologi informasi bersamaan berkontribusi terhadap administrasi keuangan Dana Desa, menurut hasil uji F nilai signifikansi sejumlah 0,000 yang jauh lebih kecil daripada batas toleransi 0,05, serta nilai F_{hitung} sebesar 31,236 > F_{tabel} sebesar 2,17. Hasil ini merefleksikan bahwa keberadaan variabel-variabel secara simultan memiliki kontribusi nyata untuk pengelolaan keuangan Dana Desa. Temuan ini memperkuat Teori Agensi, di mana prinsip-prinsip *Good Governance* dan teknologi informasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk meminimalisir pertentangan kepentingan antara agent (pemerintah desa) dan *principal* (masyarakat). Transparansi dan akuntabilitas memperkuat pengawasan publik, responsibilitas menjamin kesesuaian tindakan dengan aturan, *fairness* menjamin keadilan dalam distribusi dana, dan teknologi informasi mendukung proses pengelolaan keuangan yang efisien serta terdokumentasi secara *real-time*.

SIMPULAN

Temuan studi memperlihatkan akuntabilitas, *fairness*, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki kontribusi dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasil ini merefleksikan bahwa peningkatan tanggung jawab aparatur desa, penerapan prinsip keadilan terhadap masyarakat, serta optimalisasi teknologi informasi berkontribusi dalam perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dana desa. Di sisi lain, transparansi, responsibilitas, dan independensi tidak memberikan implikasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan ketiga prinsip tersebut belum mampu menghasilkan perbaikan yang substansial dalam pengelolaan keuangan desa, karena implementasinya masih bersifat prosedural dan belum dijalankan secara konsisten. *Good Governace* (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi teridentifikasi memiliki kontribusi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Temuan ini



mempertegas *Good Governace* serta dukungan teknologi merupakan kunci penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa transparan, akuntabel maupun efisien serta mampu meminimalisir penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziiz, N. M., & Prastiti, D. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi Aktual* (Vol. 6, Issue 2).
- Elisa, J., & Ginting, S. (2024). The Influence Of Transparency, Accountability, Community Participation On Village Fund Management In Realizing Good Governance In Mountain Villages In Tigabinanga District" Karo District". *Jurnal Ilmiah Accusi*. <https://doi.org/10.36985/jia.v6i1.1206>
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayyuni, N., Martini, R., & Nurhasanah. (2024). Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kikim Timur. *Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 7(2). <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5390>
- Heriningsih, S., & Sudaryani, D. (2019). Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Optimum : Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Indriasari, D., Rachma Sari, K., & Zainal Arifin, K. (2020). *Determinants of Village Financial Management Accountability*.
- Izzah, D., Taufik, T., & Oktari, V. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kabupaten Kampar. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 12–28. <https://current.ejournal.unri.ac.id>
- Jauhari, H., Sari, Y., & Dewata, E. (2019). Implementation of Good Governance, Utilization of Information Technology, And Reliability of Government Financial Statements. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(2), 117–126. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i2.59>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Melinda, F., Dewata, E., & Oktarida, A. (2022). *Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1). <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Radar Banyuasin. (2025). *Batas Pencairan 25 Juni 2025, Dana Desa Tahap Pertama Hangus*. <https://www.Radarbanyuasin.Com/Batas-Pencairan-25-Juni-2025-Dana-Desa-Tahap-Pertama-Hangus/>.
- Rahadian, A. H., & Rusanono, B. (2015). Pengaruh Responsibilitas dan Sikap Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Ridwan, M., Ery Santosa, R. W., Suharto, S., & PRZ Putri, A. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.35906/EQUILI.V12I1.1429>
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, & Aristantia, S. E. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance*.
- Safrizal, S., Taufik, T., & Basri, Y. M. (2022). Good Governance on Village Fund Management with The Use of Information Technology as A Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.15-28>
- Salma, M., & Diana, N. (2022). *Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)* (Vol. 11).
- Silitonga, L. (2022). *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Pulau Borang Ditangkap di Banten*. <https://rri.co.id/hukum/100318/korupsi-dana-desa-mantan-kades-pulau-borang-ditangkap-di-banten>.
- Susliyanti, E. D. (2020). Determinan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 23(1). <https://doi.org/10.35591/wahana.v>
- Yanti, E. R., Wiralestari, W., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(01), 53–64. <https://doi.org/10.22437/JMK.V12I01.20371>